

## **PERANAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENANGANAN MASALAH ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR (2014-2017)**

Indah Nur Azizah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Komputer Indonesia  
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Bandung 40132 Indonesia

*Email: indahnurazizah12@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Indonesia has a significant role as Indonesia helps to deal with ethnic Rohingya issues in Myanmar by politically engaging with the Myanmar government to discuss the issue, proposing solutions to stop violence and sending humanitarian aid to the Rohingyas both in Myanmar and in Bangladesh. Indonesia views positively with what the Myanmar government has done to solve its internal problems. This problem is certainly gradual to be solved. Indonesia as a country that has a very good relationship with Myanmar, always supports all the process within the government of Myanmar and respect the sovereignty of Myanmar.*

*Keywords: The Role of Indonesia, Myanmar, Ethnic Rohingya, Foreign Policy.*

### **ABSTRAK**

Indonesia memiliki peranan yang cukup penting karena Indonesia membantu menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar dengan cara melakukan secara politik dengan pemerintahan Myanmar untuk membicarakan masalah ini, mengusulkan solusi-solusi untuk memberhentikan kekerasan serta Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang berada di Myanmar maupun di Bangladesh. Indonesia memandang secara positif dengan apa yang telah pemerintah Myanmar lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam negerinya. Permasalahan ini tentu secara bertahap agar dapat terpecahkan. Indonesia selaku negara yang menjalin hubungan yang sangat baik dengan Myanmar, selalu mendukung segala proses dalam pemerintahan Myanmar dan menghormati kedaulatan Myanmar.

**Kata Kunci:** Peranan Indonesia, Myanmar, Etnis Rohingya, Politik Luar Negeri.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Konflik antar etnis Rohingya dengan etnis Burma di Myanmar merupakan konflik internal yang kompleks dan belum terselesaikan yang mulai terjadi pada masa penjajahan kolonial Inggris hingga saat ini. Etnis Rohingya merupakan orang-orang yang dibawa oleh kolonial Inggris melalui perjanjian Yandabo. Pada tahun 1824 Inggris menjajakan kaki di Burma atau kini dikenal Myanmar dan terjadi perang dengan Burma. Inggris menang dan membawa orang-orang *British-India* dan etnis Rohingya ke Arakan/Rakhine (EBO, 2009:2). Istilah Rohingya berasal dari kata *Rohai* atau *Roshangee*. *Rohai* atau *Roshangee* ialah istilah yang ditujukan untuk penduduk muslim Arakan “tua” (*Rohang/Roshang/Roang*) tetapi lebih terkenal sebagai Charganiya (Bustamam, 2013:321). Pada masa kolonial Inggris kehidupan muslim Rohingya sejahtera karena mereka menguasai sektor ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan sosial menimbulkan rasa iri dari etnis mayoritas di Rakhine. Hal ini yang memicu konflik antar etnis di Myanmar.

Pada saat kolonial Inggris mengalami kemunduran dan kalah dari kolonial Jepang, nasib etnis Rohingya mulai terancam. Pada masa tersebut, kolonial Jepang beserta pemerintahan Myanmar melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang dibawa oleh kolonial Inggris. Sehingga etnis Rohingya melakukan eksodus besar-besaran ke Bangladesh guna mencari

perlindungan dan kehidupan yang layak. Ketika Myanmar merdeka, rezim militer menguasai pemerintahan. Pada masa ini, pemerintahan junta militer menunjukkan bahwa mereka anti muslim. Mereka melakukan propaganda anti muslim yang mengakibatkan banyaknya minoritas muslim (Rohingya) diusir secara paksa dari Myanmar. Serta Pemerintah Myanmar memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*). Dalam *Burma Citizenship Law 1982* pemerintahan junta militer Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu etnis mayoritas maupun etnis minoritas yang ada di Myanmar. Pemerintahan junta militer Myanmar menganggap etnis Rohingya merupakan imigran yang dibawa oleh kolonial Inggris.

Agar menimbulkan rasa yang tidak aman dan nyaman kepada etnis Rohingya untuk menetap dan bertempat tinggal di Rakhine, junta militer melakukan tindakan diskriminasi. Tindakan diskriminasi yang dilakukan junta militer seperti tidak diberikan izin usaha, menaikan pajak yang berlebihan kepada etnis Rohingya jika pajak tersebut tidak mampu dibayar maka lahan pertanian, tambak atau properti apapun yang mereka miliki akan disita, tidak diberikan izin untuk keluar dari otoritas lokal, etnis Rohingya dijadikan sebagai pekerja paksa di kamp-kamp konsentrasi Rakhine Utara, tidak diberikan akses untuk mengeyam pendidikan, sulit untuk mendapatkan izin perkawinan, pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan

Rohingya dan penahanan tanpa melalui proses peradilan (Satria dan Jamaan, 2013:5).

Tindakan kekerasan dan diskriminasi yang diterima etnis Rohingya menyebabkan mereka melakukan eksodus ke negara-negara tetangga. Indonesia merupakan negara yang menerima imigran dari etnis Rohingya selain Bangladesh dan Malaysia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa (<https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id> diakses 26 Mei 2018). Dengan jumlah penduduk yang besar ditambah dengan kedatangan imigran Rohingya tentu akan menimbulkan ancaman dari segi keamanan maupun ekonomi yang dihadapi Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut, maka Indonesia ikut turut andil dalam masalah etnis Rohingya di Myanmar.

Indonesia menunjukkan dirinya peduli dan menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam membantu menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar dikarenakan garis besar politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjaga perdamaian dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan pada keadilan sosial. Melalui website resmi kepresidenan Republik Indonesia, presiden Jokowi menyuarakan bahwa dirinya akan berkomitmen membantu menanganu masalah etnis Rohingya dan meredam kekerasan di Myanmar. Indonesia mengutuk dan mengecam keras atas tindakan Myanmar yang melakukan

*ethnic cleansing* dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya.

Langkah Indonesia dalam membantu menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar, yaitu dengan melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar, menawarkan solusi kepada pemerintah Myanmar, menyinggung isu Rohingya di forum-forum internasional dan memberikan bantuan. Indonesia membentuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang kemanusiaan pada 31 Agustus 2017. LSM ini bernama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang bertugas untuk membantu krisis kemanusiaan di Myanmar. AKIM beranggotakan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Palang Merah Indonesia, PKPU dan Aksi Cepat Tanggap. AKIM memiliki program kerja, yaitu *Humanitarian Assitance for Sustainable Community* untuk Myanmar (HASCO). Program HASCO hanya memberikan bantuan kemanusiaan dan pengembangan kapasitas untuk area dan masyarakat yang terkena dampak konflik di Rakhine (<https://www.liputan6.com/news/read/3080648/5-aksi-indonesia-bantu-atasi-krisis-rohingya-di-myanmar> diakses 03 Juni 2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti ingin mengutarakan Bagaimana peranan Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar (2014-2017)?

### 1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar?
2. Apa hambatan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan upaya-upaya Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar?
3. Bagaimana perkembangan dari peranan Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar?

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar, mengetahui hambatan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan upaya-upaya Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar dan mengetahui bagaimana perkembangan peranan Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar.

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

### 2.1 Hubungan Internasional

Menurut Mohtar Mas'ood dalam buku P. Anthonius Sitepu (2011:6-7) mengatakan bahwa adanya hubungan internasional karena adanya dorongan oleh motivasi untuk memperoleh

informasi tentang berbagai fenomena internasional dan terbatas hanya dalam belajar memahami demi membedakan antar pelaku seluas negara atau bangsa yang berdasarkan pada aspek domestiknya dan sebaliknya, pelaku yang berdasarkan pada motivasi atau dorongan bahwa internasional sebagai suatu kontribusi yang cukup penting dalam kerangka hubungan internasional.

Pelaksanaan hubungan internasional dilakukan melalui banyak jalur selain jalur pemerintah. Negara sebagai aktor dalam politik global tidak selalu bertindak sebagai aktor independen dan kelompok-kelompok yang ada di dalam negara tidak selalu bertindak secara koheren. Perusahaan multinasional dan organisasi internasional merupakan aktor lain selain negara (Jemadu, 2008:46).

### 2.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri memiliki dua elemen pokok yaitu, tujuan nasional yang akan dicapai dan alat untuk mencapai tujuan itu. Interaksi antara tujuan nasional dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan nasional terdapat dalam pelaksanaan politik luar negeri yang dimaksud. Terbentuknya politik luar negeri adalah sebagai upaya untuk menemukan eksplanasi tentang proses pembuatan keputusan luar negeri (*foreign policy decision making process*) beserta implikasinya. Proses pembuatan keputusan-keputusan luar negeri atau implementasinya bersifat *relational* (Sitepu, 2011:69).

Setiap negara melakukan politik luar negeri dalam pergaulan

internasional demi mencapai kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri adalah aksi dan identitas suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara guna untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional dan telah ditetapkan dengan tujuan khusus untuk sebuah kurun waktu yang sedang dihadapi lazim disebut kepentingan nasional (Sumpena, 1985:7).

### 2.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir dari yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khusus adalah unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan serta kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2011:35).

Terdapat dua perbedaan dalam kepentingan nasional. *Pertama*, kepentingan nasional bersifat *vital* (esensial) yang berkaitan dengan kelangsungan hidup negara dan serta nilai-nilai inti yang merupakan identitas kebijakan luar negerinya. Dilihat dari seberapa jauh kepentingan harus ada dan digunakan dan disaat keadaan darurat suatu negara yang harus diputuskan. *Kedua*, kepentingan nasional bersifat *non-vital* (sekunder) yang tidak berkaitan dengan eksistensi negara tetapi tetap diperjuangkan

melalui kebijakan luar negeri. Dilihat dari proses yang digunakannya yang berlangsung lama tetapi hasil dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik untuk jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008:67-69).

### 2.4 Peranan Nasional

Dalam kebijakan luar negeri suatu negara memiliki pertimbangan dalam pembuatannya. Dimana merefleksikan pertimbangan terdapat dua komponen didalamnya yakni orientasi dan peranan. Rudy mengutip pernyataan Holsti dalam 16 jenis peranan nasional, yaitu:

1. Benteng revolusi, pembebas ialah beberapa pemerintah mempunyai tugas bertujuan untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri. Tugasnya yaitu membebaskan pihak lain atau berperan sebagai pelindung gerakan revolusi asing.
2. Pemimpin regional ialah tugas dan tanggung jawab khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain dikawasan.
3. Pelindung regional ialah implikasi dari tanggung jawab pemimpin suatu negara dalam suatu kawasan. Berfokus kepada pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya.
4. Bebas aktif ialah berfokus kepada peningkatan keterlibatan mengenai hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan bertindak sebagai penengah dalam konflik.

5. Pendukung kemerdekaan ialah tidak bertanggung jawab dalam mengorganisasi, memimpin maupun mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri.
6. Anti imperialis ialah imperialisme dipandang sebagai ancaman serius. Demi melawan imperialisme banyak negara yang menyatakan agen dari anti imperialis.
7. Pelindung ideologi ialah memandang kebijakan luar negerinya termasuk dalam term nilai-nilai pelindung dari serangan.
8. Mediator integrator ialah negara-negara berkembang yang memandang dirinya mampu untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah negara lain.
9. Kolaborator sistem regional ialah berkomitmen ke kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama dan berintegrasi dengan unit politik lainnya.
10. Developer ialah negara industri berperan untuk membantu negara-negara berkembang. Negara-negara industri telah mempunyai kemampuan atau kelebihan tertentu.
11. Penghubung ialah muncul dalam bentuk yang unik dan tidak menstimulir tindakan tertentu.
12. Sekutu andalan ialah pemimpin suatu negara menyatakan bahwa akan mendukung sekutunya dengan cara apapun dan tidak mengharapkan imbalan.
13. Independen ialah kepala negara menyatakan bahwa negaranya dalam keadaan apapun akan mengejar kepentingannya. Jika tidak ia tidak akan bertindak apapun dalam sistem internasional.
14. Teladan ialah berperan sebagai role model bagi negara-negara lain.
15. Internal development ialah kurangnya kesadaran partisipasi dalam politik internasional pada peranan ini. Mereka hanya mementingkan pembangunan negaranya sendiri.
16. Konsep peranan lainnya ialah implikasi dari sumber-sumber lain dalam politik luar negerinya selain peranan diatas (Rudy, 2002:144).

## 2.5 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi (Qamar, 2013:16).

HAM ialah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak

warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan (Liba, 2002:139).

### 2.5.1 Pelanggaran HAM

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau pun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (Undang-Undang RI, 2000).

Pelanggaran HAM dapat dilihat dari dua macam cara, yaitu: *Pertama*, pelanggaran HAM dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya sebagai bagian dari kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang disebabkan oleh hakekat manusia yang tidak sempurna. *Kedua*, pelanggaran HAM terjadi karena penyangkalan terhadap HAM secara sistemik atau sistematis yang mengarah pada apa yang disebut *gross violations of human rights* (Jemadu, 2008:280).

### 2.6 Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan internasional. Kejahatan internasional diartikan sebagai suatu bentuk pidana yang dianggap dapat merugikan bagi seluruh masyarakat internasional. Setiap Lembaga peradilan yang ada di tiap-tiap negara bahkan termasuk di dalamnya peradilan internasional,

mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili para pelakunya (Atmasasmita, 2000:45).

Kejahatan Genosida termasuk kedalam 22 jenis kejahatan internasional yang diantaranya berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Statuta Roma, kejahatan genosida didefinisikan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya: (a) Membunuh anggota kelompok tersebut; (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain” (*UN General Assembly*. 1998).

### 2.7 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor negara dengan negara dan aktor negara dengan non-negara berupa politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Hubungan Indonesia dengan Myanmar terjalin dengan baik dari segi

isu-isu kontemporer maupun non-kontemporer dalam hubungan internasional. Konflik internal di Myanmar tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap suatu etnis minoritas yang berada disana, yaitu etnis Rohingya.

Pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan Myanmar berupa mereka membantai dan membunuh secara masal etnis Rohingya (*ethnic cleansing*). Berdasarkan *Burma Citizenship Law* 1982 pemerintah Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan ke etnis Rohingya. Etnis Rohingya diusir secara paksa dikarenakan mereka hanyalah imigran gelap yang tidak memiliki identitas di Myanmar. Etnis Rohingya tidak diberikan izin usaha dan tidak diberikan akses untuk mengenyam pendidikan.

Dunia internasional mengancam perbuatan Myanmar yang telah melakukan kejahatan genosida ke etnis Rohingya. Sesama berada satu kawasan dengan Myanmar yaitu Asia Tenggara, Indonesia turut tangan dalam membantu menyelesaikan masalah internal yang belum usai di Myanmar. Indonesia berperan dalam menyelesaikan konflik antar etnis di Myanmar sesuai dengan peranan nasional Indonesia sebagai bebas aktif dan mediator integrator.

Peran Indonesia sebagai bebas aktif dalam konflik ini ialah Indonesia mengirimkan menteri luar negerinya untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Berharap dengan melakukan peningkatan hubungan diplomatik dengan Myanmar, konflik

ini dapat terselesaikan. Peranan ini Sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Dimana Indonesia tidak memihak kepada siapapun dalam konflik tetapi Indonesia sebagai penengah dalam konflik ini.

Selanjutnya Indonesia berperan sebagai mediator integrator. Indonesia memandang dirinya mampu untuk menjadi penengah dalam konflik di Myanmar. Indonesia telah mempertimbangkan bahwa dirinya bisa menjadi penengah karena Indonesia telah meninjau dari segi internal yang berkaitan dengan kebutuhan domestik dan sikap masyarakat Indonesia terhadap konflik ini. Serta dari segi eksternal yang berkaitan dengan respon Indonesia terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Indonesia menawarkan upaya-upayanya agar masalah ini terselesaikan.

Indonesia memiliki beberapa langkah-langkah agar terlaksananya peranan Indonesia dalam masalah etnis Rohingya di Myanmar, diantaranya: Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Myanmar dalam membahas masalah yang pelik di Myanmar agar menemukan titik terang masalah tersebut. Indonesia juga menawarkan solusi kepada pemerintahan Myanmar. Indonesia bekerjasama dengan PBB untuk membahas bagaimana langkah yang tepat bagi Indonesia agar dapat menjadi penengah dalam masalah etnis Rohingya. Dikarenakan diplomasi Indonesia berhasil dengan Myanmar, Indonesia diperbolehkan menjadi negara yang secara langsung



memberikan bantuan kemanusiaan, sehingga Indonesia membentuk sebuah LSM internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa pakaian, makanan, selimut dan obat-obatan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Upaya-Upaya Indonesia dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar**

Indonesia merupakan negara the *first humanitarian responder*. Dimana konflik antar etnis dan status kewarganegaraan etnis Rohingya berimplikasi lintas batas negara sehingga suatu solusi yang komprehensif dan multipihak dari aktor internasional merupakan keharusan untuk menjaga keamanan dan stabilitas dikawasan. Indonesia sebagai aktor internasional berupaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas dikawasan. Apalagi dalam isu etnis Rohingya di Myanmar sudah menyebabkan suatu dampak ancaman keamanan negara-negara lain. Untuk mencegah masalah etnis Rohingya semakin membesar sehingga Indonesia berupaya dalam membantu menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar.

##### **3.1.1 Melakukan Diplomasi Bilateral dengan Myanmar**

Indonesia melakukan pendekatan secara politik dengan Myanmar dalam masalah etnis Rohingya ini. Arah diplomasi Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan pendekatan total diplomasi yang low profile, inklusif

dan rekonsiliatif. Indonesia menjauhi diri dari menggunakan *megaphone diplomacy*. Hal ini bisa dilihat dari cara Menteri luar negeri Indonesia lebih aktif dalam berdiplomasi secara bilateral. Pendekatan total diplomasi secara *low profile* terlihat dari ideosinkratik pemimpin suatu negara. Ideosinkratik Presiden Jokowi yang sederhana serta memiliki karakter yang baik. Karakteristik dari seorang Presiden Jokowi membuat beliau membantu Myanmar untuk menyelesaikan masalah etnis Rohingya. Dengan cara Presiden Jokowi memanfaatkan hubungan yang terjalin sangat baik menjadikan Indonesia memiliki peluang sebagai perantara dalam masalah ini. Pendekatan total diplomasi secara inklusif dalam masalah etnis Rohingya di Myanmar maksudnya ialah Indonesia secara signifikan terus melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar dalam membahas isu etnis Rohingya dan kerjasama ekonomi. Pendekatan total diplomasi secara rekonsiliatif dalam masalah ini ialah Indonesia mencoba membantu memulihkan dan menyelesaikan kondisi dan situasi di Rakhine dan serta memulihkan hubungan etnis mayoritas di Myanmar dengan etnis Rohingya.

Diplomasi bilateral Indonesia-Myanmar ialah untuk mendukung rekonsiliasi Myanmar dan membahas masalah etnis Rohingya. Indonesia mendukung rekonsiliasi Myanmar karena saat ini pemerintah Myanmar dalam masa transformasi menuju demokrasi. Pemerintah Myanmar yang selama ini dipimpin oleh militer, dikit

demi sedikit mulai membuka diri dan melakukan transformasi sejak tahun 2010. Dukungan Indonesia untuk rekonsiliasi Myanmar ialah pada saat Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin di Naypyidaw tahun 2015. Pertemuan ini menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Myanmar untuk mempercepat proses demokratisasi dan reformasi. Indonesia juga memberikan bantuan kapasitas dan kerjasama dalam pelaksanaan pemilu Myanmar. Indonesia membahas masalah *irregular movement of persons* dalam pertemuan ini. Indonesia meminta Myanmar agar mencegah terjadinya *irregular movement of migrants* (<http://www.beritasatu.com/asia/275998-indonesia-jalin-kerjasama-dengan-myanmar.html> diakses 20 Agustus 2018).

Pada 06 Desember 2016 terjadi pertemuan pertama Indonesia dengan Myanmar dalam membahas isu etnis Rohingya. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengunjungi Aung San Suu Kyi (Petinggi Konselor Myanmar) di Naypyidaw. Pertemuan tersebut guna membahas situasi kemanusiaan dan stabilitas bagi semua warga, terutama warga muslim di Rakhine. Serta Indonesia mengutus Duta Besar RI untuk Myanmar melakukan kunjungan ke Rakhine pada 03-06 November 2016 untuk melihat situasi pasca penyerangan tanggal 09 Oktober 2016

(<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/menlu-retno-bahas-rakhine-state->

[myanmar.aspx](https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/menlu-retno-bahas-rakhine-state-myanmar.aspx) diakses 20 Agustus 2018).

Pada 04 September 2017 Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengunjungi Naypyidaw untuk bertemu dengan Petinggi Konselor Myanmar, Aung San Suu Kyi yang juga menjabat sebagai pemimpin partai mayoritas di parlemen Myanmar (Partai Liga Demokrasi Nasional). Kunjungan Menteri Retno Marsudi atas perintah Presiden Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Retno Marsudi meminta Myanmar untuk mencegah dan memberhentikan kekerasan. Indonesia meminta untuk memberikan perlindungan kepada semua warga di Rakhine. Indonesia menawarkan solusi dan meminta untuk memberikan akses bantuan kemanusiaan (<https://tirto.id/menlu-retno-bertemu-petinggi-myanmar-bahas-rohingya-hari-ini-cvTQ> diakses 20 Agustus 2018).

Menurut peneliti, semua kerjasama yang ditawarkan oleh Indonesia ke Myanmar ialah untuk mendukung dan membantu rekonsiliasi Myanmar sudah tepat. Karena selama ini image Myanmar sebagai negara yang penduduknya hidup dibawah kekuasaan militer. Sulitnya akses informasi dan komunikasi, berekspresi, berpendapat, dan akses untuk memasuki Myanmar sangat sulit, apalagi mengenai isu etnis Rohingya. Myanmar sangat menutup rapat dari dunia internasional mengenai isu Rohingya. Semua hal tersebut masih ada pengontrolan oleh junta militer Myanmar. Dengan hal yang dilakukan Indonesia diharapkan dapat membuka akses bagi dunia internasional ke

Myanmar dengan begitu dunia internasional juga dapat membantu proses demokratisasi dan reformasi Myanmar. Menjadi negara yang demokrasi dan reformasi mengubah struktur negara Myanmar dan sistem politik di Myanmar. Hal ini akan mengubah pola pikir penguasa-penguasa Myanmar yang duduk di pemerintahan untuk lebih terbuka, dan dapat membuat kebijakan dalam negerinya agar lebih menghormati HAM supaya masalah etnis Rohingya dapat terselesaikan. Sehingga kawasan Asia Tenggara terjaga dari potensi ancaman yang dapat saja ditimbulkan dari pengungsi etnis Rohingya, dapat meningkatkan kesatuan di ASEAN, dan memajukan ASEAN.

### **3.1.2 Menawarkan Solusi kepada Myanmar**

Indonesia menawarkan solusi ke pemerintah Myanmar. Solusi tersebut dikenal sebagai formula 4+1 atas rekomendasi dari Sekjen PBB yaitu Kofi Annan. Formula 4+1 merupakan solusi untuk pemerintah Myanmar agar memberhentikan kekerasan. Empat elemen dari formula 4+1 dimaksud ialah untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Serta satu elemen yang dimaksud ialah pentingnya agar rekomendasi dari Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah Myanmar.

### **3.1.3 Membicarakan Isu Etnis Rohingya di Forum-Forum Internasional**

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI yang dilaksanakan Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 20 Januari 2017, Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan untuk mencari solusi dari masalah etnis Rohingya. Indonesia juga menyampaikan beberapa usulan agar situasi di Myanmar dapat diperbaiki, diantaranya (<https://www.rappler.com/indonesia/berita/159047-usulan-indonesia-ktt-oki-mengenai-myanmar> diakses 20 Agustus 2018):

1. OKI diharapkan dapat memberikan bantuan untuk mencegah situasi di Rakhine.
2. OKI diharapkan dapat membantu Myanmar secara konstruktif.
3. OKI diharapkan mampu bekerjasama dengan ASEAN dalam menghadapi berbagai aspek mengenai masalah di Rakhine.
4. Meminta OKI agar dapat menjadi mitra pembangunan ekonomi di Myanmar termasuk kerjasama dengan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Di KTT ASEAN ke-31 yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada 2017, Indonesia mengangkat isu Rohingya. Dalam forum tersebut Indonesia mengingatkan bahwa ASEAN harus mampu mengatasi permasalahan sendiri (yaitu etnis Rohingya) dan tidak boleh ada satu negara di Asia Tenggara tertinggal dari negara lainnya (<http://www.metrotvn>

ews.com/cards/4193-rohingya/9K5R4xxN-indonesia-angkat-isu-kemanusiaan-rohingya-ditkt-asean diakses 20 Agustus 2018). Jadi selama Indonesia menyinggung persoalan etnis Rohingya di forum-forum internasional, Indonesia selalu mengedepankan sesuai dengan pandangan Indonesia ke Myanmar. Indonesia mencoba melihat isu ini dengan kaca mata yang lebih besar dan secara *balance*. Karena persoalan masalah di *Rakhine State* tidak hanya persoalan tentang etnis Rohingya saja. Indonesia sendiri tidak menggunakan istilah Rohingya melainkan Indonesia menggunakan istilah *Rakhine State* mengenai isu ini. Hal ini dilakukan Indonesia untuk menjaga sensitivitas Myanmar. Indonesia memandang secara positif terhadap proses yang sedang dilakukan di dalam pemerintahan Myanmar.

#### **3.1.4 Indonesia Memberikan Bantuan Kemanusiaan**

Indonesia secara berkala memberikan bantuan kemanusiaan telah sejak lama dalam masalah ini. Bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia bersifat darurat seperti tenda. Serta bantuan kemanusiaan yang bersifat fasilitas. Bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia bersifat inklusif. Dimana artinya fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya etnis Rohingya yang menggunakannya tetapi seluruh masyarakat *Rakhine* juga dapat menggunakannya. Fasilitas-fasilitas yang dibangun di *Rakhine* berupa:

1. Indonesia membangun sekolah dan rumah sakit.

Indonesia mendirikan empat sekolah di beberapa wilayah *Rakhine*. Dua di wilayah *Minbya Township* dan lainnya di *Maungdaw Township* dan *Buthidaung Township*. Pembangunan sekolah di wilayah *Rakhine* ini dibawah LSM Indonesia AKIM. Peresmian keempat sekolah tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, A. M. Fachir bersama-sama dengan *Union Minister of Border Affairs* dan *Chief Minister Rakhine State* pada 08 Desember 2014 (SEDIKLU XXXIX, Kemlu RI, 2015). Indonesia juga mendirikan satu rumah sakit di *Myaung Bwe Village, Mrauk U Township, Rakhine State*. Pembangunan rumah sakit Indonesia untuk Myanmar dibawah pengawasan *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) dan Palang Merah Indonesia (PMI). Akan tetapi rumah sakit Indonesia untuk Myanmar ini sedang proses pembangunan (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/06/06/p9wi6u384-pembangunan-rs-indonesia-di-myanmar-sudah-50-persen> diakses 20 Agustus 2018).

2. Indonesia memberikan paket bantuan melalui AKIM sebanyak 10 kontainer untuk warga Rohingya yang berada di *Rakhine* pada 2016 (<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/20263831/mendagri-tanya-pemerintah-myanmar-saja-yang-pencitraan-siapa> diakses 20 Agustus 2018).

3. Indonesia memberikan bantuan makanan ke Myanmar sebanyak 20 ton pada 22 September 2017. Bantuan kemanusiaan tersebut berupa makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, tenda, obat-obatan, kain sarung, makanan siap saji dan tangki air. Bantuan kemanusiaan tersebut dikirim menggunakan dua pesawat Hercules (<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/22/07391491/bantuan-indonesia-untuk-rohingya-tiba-di-myanmar> diakses 20 Agustus 2018).
4. Indonesia memberikan bantuan secara konseling bagi pengungsi etnis Rohingya. Bantuan konseling ini diberikan oleh relawan Indonesia melalui Aksi Cepat Tanggap. Diperlukannya pembelajaran konseling bagi korban karena mereka telah mengalami *post-traumalogy* dari kekerasan yang mereka terima.

### **3.2 Hambatan yang dihadapi Indonesia dalam Pelaksanaan Upaya-Upaya Indonesia dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar**

#### **3.2.1 Kedaulatan Myanmar**

Kedaulatan dan dalam negeri Myanmar sendiri yang menyebabkan masalah etnis Rohingya ini tidak dapat menemukan titik terang secara bertahun-tahun. Masalah dalam negeri di Myanmar sangatlah kompleks. Kekompleks-an masalah di Myanmar berasal dari lemahnya perekonomian, nasionalism yang tinggi, kekuasaan sebagian dipegang oleh junta militer dan saat ini adanya perubahan dalam

sistem pemerintahan Myanmar serta pembagian kekuasaan antara pemerintah sipil dengan junta militer. Awalnya ada pertentangan dalam mengimplementasikan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia. Karena saat ini di Myanmar sedang dalam membagi kekuasaan antara pemerintah sipil Myanmar dengan militer. Junta militer Myanmar yang telah menguasai Myanmar bertahun-tahun menginginkan kedaulatan Myanmar seperti dulu dan merasa terintervensi jika Indonesia ikut campur ke dalam masalah internal Myanmar.

Sedangkan pemerintah sipil Myanmar menginginkan perubahan, karena Myanmar telah menjadi perhatian dunia internasional terkait pelanggaran ham berat yang mereka lakukan terhadap etnis Rohingya. Jika Myanmar tetap menjadi seperti dulu maka Myanmar akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi, maka Myanmar mengalami perubahan terhadap bentuk pemerintahannya, yaitu Republik Kesatuan yang berdasarkan Konstitusi Myanmar tahun 2008. Dengan berubahnya bentuk pemerintahan tersebut, Myanmar tidak sepenuhnya dipimpin oleh junta militer. Sehingga Myanmar mau berupaya untuk mengimplementasikan solusi dari Indonesia, berdasarkan pertimbangan pemerintah sipil Myanmar dengan militer.

Saat ini pemerintah Myanmar sedang berusaha menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negerinya. Di Myanmar ada sekitar 20 kelompok bersenjata. Hanya 10 kelompok

bersenjata yang menandatangani kesepakatan untuk bergabung melakukan gencatan senjata. Kelompok-kelompok bersenjata ini dalam proses untuk melakukan gencatan senjata di beberapa tempat konflik bersenjata di Myanmar, seperti di Kachin dan Rakhine. Hal ini dilakukan dengan cara pendekatan keamanan untuk menjaga kesatuan di Myanmar. Sepuluh kelompok bersenjata yang telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata, berarti mereka telah dapat menerima perubahan dalam sistem pemerintahan Myanmar. Kelompok bersenjata yang tidak menandatangani kesepakatan tersebut, berarti mereka tidak menerima perubahan yang terjadi di Myanmar, mereka tetap menginginkan kesatuan Myanmar seperti dahulu. Hal ini dikarenakan mereka memiliki jiwa nasionalism yang telah ditanamkan sejak kepemimpinan Ne Win dan kebencian terhadap etnis minoritas muslim yang telah mereka pendam sejak kolonial Inggris.

### **3.2.2 Perdebatan Nama “Rohingya Antara Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya**

Penyebab lainnya masalah etnis Rohingya ini belum terselesaikan saat ini ialah pemerintah Myanmar meminta etnis Rohingya untuk mengubah nama Rohingya. Karena etnis dengan kewarganegaraan merupakan dua konsep yang berbeda. Pemerintah Myanmar telah menawarkan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Namun ada persyaratan yang harus disetujui oleh etnis Rohingya, yaitu etnis Rohingya harus mengakui diri mereka sebagai

orang Bengali. Tetapi sebagian etnis Rohingya menolak untuk mengakuinya dan menolak untuk didaftarkan menjadi warga negara Myanmar, maka pemerintah Myanmar membangun kamp-kamp sementara bagi etnis Rohingya. Didalam kamp-kamp tersebut orang-orang Rohingya akan ditahan dan diawasi oleh pemerintah Myanmar (<https://www.hrw.org/news/2014/10/03/burma-government-plan-would-segregate-rohingya> diakses 30 Juli 2018).

### **3.3 Perkembangan dari Upaya Indonesia dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar**

#### **3.3.1 Perkembangan dari Diplomasi Bilateral Indonesia-Myanmar**

Keberhasilan berdiplomasi Indonesia dalam masalah etnis Rohingya ini. Diplomasi Indonesia membuahkan hasil saat pemerintahan Myanmar memberikan izin akses bagi Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung ke Rakhine. Indonesia juga sebagai pembuka pintu bagi ASEAN Humanitarian Assistance Centre (AHA Centre) untuk pengungsi etnis Rohingya. Bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh AHA Centre untuk pengungsi etnis Rohingya telah diserahterima melalui instansi terkait di Yangon. Pengiriman dan penyampaian bantuan kemanusiaan ini dipantau oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Retno Marsudi melalui laporan dan masukan yang diterima. Indonesia menjadi negara satu-satunya yang berhasil duduk bersama dengan salah satu petinggi Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi

dan didengarkan serta dikabulkan permintaan Indonesia oleh Aung San Suu Kyi.

### **3.3.2 Perkembangan dari Solusi yang ditawarkan Indonesia**

Perkembangan upaya Indonesia menawarkan solusi ialah pemerintah Myanmar sedang mengupayakan melakukan solusi yang ditawarkan Indonesia. Dilihat dari pertemuan bilateral Indonesia bersama Myanmar yang mencapai suatu pencapaian yang signifikan dalam pelibatan Myanmar dalam upaya penanggulangan irregular migrant. Dalam pertemuan Indonesia-Myanmar mencapai beberapa kesepakatan yaitu (SEDIKLU XXXIX, 2015:16):

- a. Myanmar bersedia melakukan langkah-langkah pencegahan migran ireguler dari wilayahnya
- b. Bersama negara lain, Myanmar akan melakukan upaya pemberantasan perdagangan manusia
- c. Myanmar akan terlibat dalam penanganan migran ireguler, termasuk melalui kunjungan konsular Kedutaan Besar Myanmar ke Aceh
- d. Myanmar berkomitmen untuk membangun *Rakhine State* yang inklusif dan non-diskriminatif.

### **3.3.3 Perkembangan dari Indonesia Membicarakan Isu Etnis Rohingya di Forum-Forum Internasional**

Perkembangan upaya Indonesia dalam membicarakan isu etnis Rohingya di forum-forum internasional mendapatkan perhatian. Melalui forum-forum internasional, dunia internasional menjadi

mengetahui secara aktual bagaimana kondisi di Rakhine dan bagaimana kondisi etnis Rohingya. Keberhasilan Indonesia menjadi speaker dalam masalah etnis Rohingya ini di forum-forum internasional menyebabkan negara-negara lain mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya. Turki merupakan negara muslim selain Indonesia yang mengirimkan bantuan untuk etnis Rohingya. Turki mengirim bantuan pertamanya untuk Rohingya pada 06 September 2017 ke barat laut Myanmar. Sebanyak 10.000 bantuan kemanusiaan yang dikirim Turki berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan (<https://news.okezone.com/read/2017/09/07/18/1770901/alhamdulillah-turki-kirim-bantuan-pertamanya-ke-myanmar> diakses 20 Agustus 2018).

#### **1. Perkembangan dari Bantuan Kemanusiaan yang diberikan Indonesia**

Etnis Rohingya sangat membutuhkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Karena banyak dari mereka yang kelaparan dan luka-luka setelah melakukan perjalanan mencari negara yang dapat mereka meminta perlindungan dan mendapat luka-luka akibat dari perlakuan militer Myanmar. Komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya merupakan suatu kabar baik bagi etnis Rohingya. Karena setelah menerima bantuan dari Indonesia, kondisi etnis Rohingya mulai membaik. Etnis Rohingya tidak lagi kelaparan, luka-luka yang mereka derita menjadi sembuh dan juga anak-anak etnis Rohingya dapat mengenyam Pendidikan dikarenakan Indonesia

telah mendirikan sekolah bagi masyarakat Rakhine. Bahkan situasi di Rakhine mulai stabil. Sekolah mulai beroperasi, orang-orang sudah mulai kembali kerumah sudah mulai normal melakukan aktifitas sehari-hari. Akan tetapi, keadaan di Rakhine masih sangat sensitif pasca kerusuhan tahun 2015. Keamanan dan stabilitas merupakan faktor terpenting di Rakhine.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1 Kesimpulan**

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam membantu menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar terdapat beberapa upaya yang dilakukan Indonesia. Upaya pertama Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Myanmar. Upaya kedua Indonesia berupaya memberikan solusi-solusi mengenai masalah etnis Rohingya ini yaitu dengan formula 4+1. Upaya ketiga ialah Indonesia membicarakan isu etnis Rohingya ini di forum-forum internasional. Serta Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat dan fasilitas. Bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat berupa tenda. Bantuan kemanusiaan yang bersifat fasilitas berupa membangun sekolah dan rumah sakit di Rakhine. Semua bantuan yang diberikan Indonesia bersifat inklusif. Indonesia sangat mengharapkan masalah etnis Rohingya ini dapat terselesaikan dengan segera.

Sedikitnya hambatan yang dihadapi Indonesia dalam membantu menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar. Hanya saja faktor kedaulatan dan dalam negeri Myanmar yang menyebabkan masalah ini belum terselesaikan bertahun-tahun. Masalah dalam negeri di Myanmar sangatlah kompleks. Saat ini pemerintah Myanmar sedang berusaha menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negerinya. Serta Myanmar sedang dalam membagi kekuasaan pemerintah sipil Myanmar dengan militer untuk menjaga kesatuan Myanmar.

Upaya yang dilakukan Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dilihat dari diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar yang menunjukkan positif. Myanmar menyambut dan menerima Indonesia untuk membicarakan masalah etnis Rohingya. Perkembangan selanjutnya ialah Myanmar mengizinkan akses bagi Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung ke Rakhine. Serta perkembangan dari solusi yang ditawarkan Indonesia ialah Myanmar sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi-solusi yang ditawarkan Indonesia.

##### **1. Saran**

Saran peneliti kepada pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang terlibat dalam masalah etnis Rohingya ini ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia lebih tegas lagi menunjukkan bahwa peranan Indonesia dan komitmen Indonesia dalam membantu menangani masalah etnis Rohingya di Myanmar.



2. Perlu ditingkatkan kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk mencari solusi yang tepat dan cepat dalam menangani masalah ini.
3. Perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Myanmar dan militer Myanmar.
4. Jika pemerintah Myanmar tidak bisa memberikan status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya karena kedaulatan Myanmar, maka pemerintah Myanmar atau bersama-sama negara yang berada dikawasan memberikan sebuah tempat tinggal yang baru (negara ketiga) bagi etnis Rohingya.

Saran peneliti untuk penelitian yang selanjutnya adalah sangat diperlukannya konfirmasi mengenai sejauh mana peranan Indonesia dalam penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar yang berfokus mengenai upaya-upaya, hambatan dan perkembangan dari permasalahan etnis Rohingya di Myanmar ini, dan secara metodologis dalam hal pengumpulan data diperlukan pengembangan data yang lebih mendalam mengenai kondisi terkini etnis Rohingya di Myanmar atau kondisi terkini tentang pemerintah Myanmar dan sikap pemerintah Myanmar terhadap masalah etnis Rohingya ini. Dengan melengkapi data-data melalui dokumen resmi milik pemerintah maka penggambaran mengenai hambatan dan perkembangan dari upaya Indonesia dalam menangani masalah etnis Rohingya ini dapat disajikan dengan lebih baik, hal tersebut tidak

dapat dilakukan dalam penelitian ini karena beberapa data yang dimiliki pemerintah tidak dipublikasikan secara umum dan adanya beberapa hambatan lain yang harus dihadapi peneliti.

## 5. Daftar Pustaka

### Acuan dari Buku

- Atmasasmita, Romli. 2000. Pengantar Hukum Pidana Internasional (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.
- Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Liba, Mastra. 2002. Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum & HAM. Jakarta: Yayasan Annisa.
- Perwita, A.A., dan Y. M., Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rudy, T. May. 2002. Hukum Internasional 2. Bandung: Refika Aditama.
- SEDIKLU XXXIX. 2015. Membumikan Diplomasi, Membangun Negeri, Buku I: ASEAN dan Multilateral. Jakarta: Pusat Pendidikan Pelatihan Kementerian Luar Negeri.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qamar, Nurul. 2013. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat). Jakarta: Sinar Grafika.

### Acuan dari Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Bustamam, Ridwan, "Jejak Komunitas Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang Terabaikan", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11, No. 2, 2013:309-338.
- EBO Briefing Paper, "*The Rohingyas: Bengali Muslims or Arakan Rohingyas?*", No. 2, 2009:1-5.
- Satria, Novandre dan Jamaan, Ahmad, "Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakhine, Myanmar", 2013:1-15.

### Acuan dari Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia. 2000.
- UN General Assembly, Rome Statute 1998, pasal 6.*

### Acuan dari Rujukan Elektronik

- Cahyoputra, Leonard AL. 2015. "Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Myanmar", dalam <http://www.beritasatu.com/asia/275998-indonesia-jalin-kerja-sama-dengan-myanmar.html> diakses 20 Agustus 2018.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2016. "Menlu Retno Bahas Isu Rakhine State dengan Daw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar", dalam <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/menlu-retno-bahas-rakhine-state-myanmar.aspx> diakses 20 Agustus 2018.
- Kompas. 2017. "Mendagri: Tanya Pemerintah Myanmar Saja, yang

Pencitraan

Siapa?", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/20263831/mendagri-tanya-pemerintah-myanmar-saja-yang-pencitraan-siapa> diakses 20 Agustus 2018.

\_\_\_\_\_. 2017. "Bantuan Indonesia untuk Rohingya Tiba di Myanmar", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/22/07391491/bantuan-indonesia-untuk-rohingya-tiba-di-myanmar> diakses 20 Agustus 2018.

Metro News. 2017. "Indonesia Angkat Isu Kemanusiaan Rohingya di KTT ASEAN", dalam <http://www.metrotvnews.com/cards/4193-rohingya/9K5R4xxN-indonesia-angkat-isu-kemanusiaan-rohingya-di-ktt-asean> diakses 20 Agustus 2018.

NN. 2014. "Burma: Government Plan Would Segregate Rohingya", dalam <https://www.hrw.org/news/2014/10/03/burma-government-plan-would-segregate-rohingya> diakses 30 Juli 2018.

Rappler. 2017. "Empat Usulan Indonesia kepada Organisasi Negara Muslim untuk Membantu Myanmar", dalam <https://www.rappler.com/indonesia/berita/159047-usulan-indonesia-ktt-oki-mengenai-myanmar> diakses 20 Agustus 2018.

Republika. 2018. "Pembangunan RS Indonesia di Myanmar Sudah 50 Persen", dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/06/06/p9wi6u384>

-pembangunan-rs-indonesia-di-  
myanmar-sudah-50-persen  
diakses 20 Agustus 2018.

Saputri, Maya. 2017. "Menlu Retno  
Bertemu Petinggi Myanmar  
Bahas Rohingya Hari Ini", dalam  
[https://tirto.id/menlu-retno-  
bertemu-petinggi-myanmar-  
bahas-rohingya-hari-ini-cvTQ](https://tirto.id/menlu-retno-bertemu-petinggi-myanmar-bahas-rohingya-hari-ini-cvTQ)  
diakses 20 Agustus 2018.

Okezone News. 2017. "Alhamdulillah,  
Turki Kirim Bantuan  
Pertamanya ke Myanmar",  
dalam  
[https://news.okezone.com/read/2  
017/09/07/18/1770901/alhamduli  
llah-turki-kirim-bantuan-  
pertamanya-ke-myanmar](https://news.okezone.com/read/2017/09/07/18/1770901/alhamdullah-turki-kirim-bantuan-pertamanya-ke-myanmar) diakses  
20 Agustus 2018.